

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara<sup>1</sup>. Merujuk kepada definisi di atas pendidik harus bekerja keras untuk mengembangkan ragam aspek perkembangan peserta didik. Proses pembelajaran yang dikembangkan harus mampu memaksimalkan seluruh pengetahuan, keterampilan, nilai dan perilaku yang terdapat di dalam diri peserta didik.

Setiap sekolah terdiri dari ratusan peserta didik yang berasal dari berbagai macam latar belakang kehidupan sosial. Potensi, bakat, minat serta kecerdasan yang dimiliki oleh para peserta didik pun berbeda-beda. Tidak hanya itu, setiap peserta didik memiliki masalah yang berbeda-

---

<sup>1</sup>Soedijarto. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*(Jakarta:PT Kompas Gramedia Nusantara,2008)h.381

beda pula. Pendidik perlu memperhatikan potensi bakat dan minat dari setiap peserta didik. Apabila perbedaan ini tidak dapat di perhatikan dan di tanggap dengan baik, maka akan menjadi sebuah potensi masalah-masalah yang menghambat proses pembelajaran peserta didik. Pihak sekolah harus menyediakan program dan layanan yang mampu mengakomodir segala potensi serta permasalahan yang dimiliki oleh peserta didik.

Usaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat mengembangkan ragam aspek perkembangan peserta didik, tidak cukup dilakukan oleh guru bidang studi. Usaha ini membutuhkan kolaborasi dengan profesi pendidik lain yang disebut konselor. Aspek legal keberadaan konselor tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 1 ayat 6 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: "Pendidik adalah tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan". Konselor akan memberikan layanan bimbingan dan konseling yang dapat melayani kebutuhan peserta didik.

Bimbingan adalah sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat

mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku<sup>2</sup>. Sedangkan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien<sup>3</sup>. Layanan bimbingan dan konseling merupakan layanan yang sangat penting dan berguna di sekolah. Pemanfaatan layanan ini akan membantu peserta didik mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya serta mengentaskan permasalahan yang mereka miliki.

Penyelenggaraan program bimbingan dan konseling terwujud ke dalam beberapa layanan yaitu, layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual dan dukungan sistem. Proses penyelenggaraan pendidikan, yang termasuk di dalamnya program bimbingan dan konseling, tidak akan pernah bisa dipisahkan dari aspek dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik, atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup>Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2004), h.97

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.105

<sup>4</sup> Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling* (Bandung:Rosdakarya, 2010), h.29

Dukungan sistem meliputi dua aspek yaitu pemberian layanan dan kegiatan manajemen. Pada aspek manajemen tercakup aspek yang sangat penting keberadaannya bagi penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana bimbingan dan konseling adalah peralatan dan perlengkapan yang menunjang tercapainya tujuan layanan bimbingan dan konseling<sup>5</sup>. Pengertian di atas mencerminkan bahwa keberadaan sarana dan prasarana sangat penting di dalam menunjang terselenggaranya kegiatan pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 nomor. 111 pasal 6 ayat<sup>6</sup> :

4. Layanan Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat yang diselenggarakan di dalam kelas dengan beban belajar 2 (dua) jam perminggu.
5. Layanan Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat yang diselenggarakan di luar kelas, setiap kegiatan layanan disetarakan dengan beban belajar 2 (dua) jam perminggu.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 111 pasal 6, mencerminkan bahwa layanan bimbingan dan konseling tidak berpusat

---

<sup>5</sup> Kemendikbud, *Pedoman Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah* (2014), h.32

<sup>6</sup> *Ibid.* h.5

pada layanan klasikal di dalam kelas. Layanan bimbingan dan konseling juga harus dilakukan di luar kelas. Hal ini berarti penyelenggaraan bimbingan dan konseling membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai bukan hanya untuk kegiatan layanan bimbingan kasikal di dalam kelas saja. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah akan berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan, apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai<sup>7</sup>. L.Dianne Borders dan Sandra M.Drury merumuskan standar dalam fasilitas Bimbingan dan Konseling yaitu fasilitas harus memadai, tepat dan tersedia untuk seluruh program bimbingan dan konseling di sekolah, memungkinkan untuk kerahasiaan demi kenyamanan, dan mendukung program yang dirancang untuk siswa<sup>8</sup>.

Pedoman bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah berisi sarana dan prasarana bimbingan dan konseling yang terbagi menjadi empat aspek meliputi, ruangan bimbingan dan konseling, instrumen pengumpul data, kelengkapan administrasi dan dokumen. Ke empat aspek ini dibutuhkan untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang efektif.

---

<sup>7</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.97

<sup>8</sup> Dianne Borders dan Sandra M drury, *Counseling Programs A Guide to Evaluation* (California: Corwin Press, Inc, 1992), h.82

Ruangan Bimbingan dan Konseling memiliki standar tertentu untuk menunjang kualitas pelayanan bimbingan dan konseling. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Pengadaan ruang bimbingan dan konseling perlu mempertimbangkan letak atau lokasi, ukuran, jenis dan jumlah ruangan, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya<sup>9</sup>. Instrumen pengumpul data, kelengkapan administrasi dan dokumen pun menjadi faktor yang sangat penting dan harus tersedia untuk menunjang penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling.

Berdasarkan hasil obeservasi peneliti selama melakukan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA 21. SMA 21 memiliki berbagai macam sarana dan prasarana yang terdiri dari ruang bimbingan dan konseling yang terdiri dari ruang kerja pembimbing, ruang konseling, ruang bimbingan dan konseling kelompok, ruang konseling pustaka dan ruang administrasi data. Instrumen pengumpul data yang dimiliki SMA 21 terdiri dari beberapa jenis, yaitu ITP, DCM, Angket, pedoman wawancara, dan pedoman observasi. Kelengkapan penunjang teknis beserta dokumen yang dimiliki pun sangat lengkap.

Peserta didik yang datang ke ruang BK SMA 21 minimal 25 peserta didik dalam satu hari. Kegiatan yang mereka lakukan di ruang bimbingan

---

<sup>9</sup> Departemen pendidikan nasional, *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*(2008),h.38

dan konseling sangat beragam. Mereka melakukan konseling individu, konseling kelompok. bimbingan kelompok tanpa harus di panggil oleh guru BK. Banyak sekali peserta didik yang ingin memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Pada akhirnya guru BK harus membuat jadwal berkunjung ke ruang BK agar peserta didik yang berkunjung dapat ditampung dan dilayani dengan baik.

Pada saat guru tidak masuk kelas ketika jam pelajaran, peserta didik segera mengunjungi ruang BK dan mengajak guru BK berdiskusi tentang berbagai macam permasalahan yang mereka alami. Peserta didik yang melakukan konsultasi mengemukakan bahwa mereka senang mengunjungi ruang Bimbingan dan Konseling dikarenakan suasana ruang bimbingan dan konseling yang nyaman. Ruang BK luas dan nyaman untuk dijadikan tempat berkumpul dengan teman-teman. Mereka bisa menonton film-film tentang pengembangan diri di ruang BK. Hubungan yang baik antara guru bimbingan dan konseling dengan peserta didik akan mendukung berjalannya kegiatan bimbingan dan konseling. menurut pengalaman peneliti selama melakukan praktik pengalaman lapangan, menemani peserta didik diskusi di ruang bimbingan dan konseling merupakan salah satu cara yang efektif untuk membina hubungan baik dengan peserta didik dibandingkan di dalam kelas. Peserta didik lebih bebas berekspresi dan menyampaikan

pendapat mereka ketika diskusi di ruang bimbingan dan konseling. Gambaran kondisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana BK sangat mempengaruhi minat siswa untuk memanfaatkan layanan Bimbingan dan Konseling.

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di beberapa sekolah mengalami beberapa masalah dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana. Masalah pertama yang dihadapi adalah keterbatasan kondisi ruang bimbingan dan konseling. Peneliti melakukan observasi di tiga sekolah yaitu SMA N 84, SMA N 56, dan SMA N 21. SMA N 84 memiliki ruang bimbingan dan konseling yang sebelumnya digunakan untuk laboratorium. Ruangan yang tersedia adalah ruang kerja pembimbing, ruang tamu dan ruang konseling. SMA 56 memiliki ruang bimbingan dan konseling yang hanya cukup untuk ruang kerja pembimbing.

Ruang konseling di SMA 84 terletak di belakang ruangan dan dibatasi dengan lemari. Sedangkan di SMA 56 konseling dilakukan di ruang kerja pembimbing. Di kedua SMA tersebut, Percakapan yang dilakukan di pada saat konseling dapat didengar oleh siapapun yang ada di ruang bimbingan dan konseling. Pada saat peneliti melakukan observasi di SMA 84, terdapat satu peserta didik yang sedang melakukan konseling dengan salah satu guru bimbingan dan konseling. Peserta didik tersebut

menceritakan masalahnya sambil menangis. Namun peserta didik tersebut terlihat enggan menceritakan masalahnya. Peserta didik tersebut mengatakan ia malu bercerita karena di ruang bimbingan dan konseling terdapat banyak orang. Hal ini terjadi dikarenakan ruang konseling tidak mendukung terjadinya asas kerahasiaan. Hal ini pun menjadi masalah besar bagi konselor, karena terjaminnya kerahasiaan merupakan salah satu pertimbangan besar bagi konseli untuk mempercayakan ceritanya kepada konselor.

Asas lainnya yang sangat dijunjung dalam dunia bimbingan dan konseling adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan menghendaki peserta didik yang menjadi sasaran layanan/kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura di dalam memberikan keterangan. Keterbukaan ini amat terkait pada terselenggaranya asas kerahasiaan<sup>10</sup>. Konseli kemungkinan besar akan lebih terbuka apabila konseli tahu bahwa apa masalahnya tidak akan menjadi konsumsi publik pihak yang tidak berkepentingan.

Kondisi ini menimbulkan masalah rendahnya keinginan peserta didik untuk melakukan konseling kepada konselor ketika menghadapi masalah. Penelitian dengan judul hubungan antara persepsi peserta didik terhadap pribadi konselor dan fasilitas BK dengan minat peserta didik untuk

---

<sup>10</sup> Syamsu yusuf dan Juntika Nur ihsan, op.cit., h.56

memanfaatkan layanan konseling di sekolah<sup>11</sup> menghasilkan adanya korelasi yang signifikan antara persepsi peserta didik tentang pribadi konselor dengan fasilitas BK dengan minat peserta didik untuk memanfaatkan layanan konseling. Sulis stiyowati(2013), meneliti bahwa 74% peserta didik di SMP Dorowati Surabaya tidak ingin melakukan konseling dikarenakan ruang bimbingan dan konseling mereka tidak memiliki ruangan khusus sehingga tidak terjamin kerahasiaannya<sup>12</sup>. Dapat disimpulkan bahwa ruang konseling yang layak harus diperhatikan keberadaannya karena sangat berpengaruh terhadap terselenggaranya layanan konseling yang efektif.

Masalah lain yang dihadapi karena keterbatasan ruang bimbingan dan konseling adalah kesulitan untuk menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan dan konseling kelompok sulit dilakukan karena tidak ada ruangan khusus yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut, sehingga kegiatan ini tidak pernah dilakukan. Kesulitan lain juga muncul ketika guru bimbingan dan

---

<sup>11</sup> Sulis Stiyowati, "Hubungan antara persepsi siswa terhadap pribadi konselor dan fasilitas BK dengan minat siswa untuk memanfaatkan layanan konseling di sekolah". Jurnal BK UNESA . Vol.03 No.01 Tahun 2013.

<sup>12</sup> Sulis Stiyowati, "Hubungan antara persepsi siswa terhadap pribadi konselor dan fasilitas BK dengan minat siswa untuk memanfaatkan layanan konseling di sekolah". Jurnal BK UNESA . Vol.03 No.01 Tahun 2013.

konseling harus menerima tamu di ruang bimbingan dan konseling, karena ruang tamu bergabung tanpa pembatas dengan ruang lainnya, kegiatan yang sedang berlangsung di dalam ruangan harus dihentikan.

Masalah kedua yang dihadapi oleh guru bimbingan dan konseling adalah kesulitan untuk mendapatkan instrumen pengumpul data. Guru pembimbing mengalami kesulitan untuk mendapatkan instrumen yang mereka butuhkan. Instrumen pengumpul data yang digunakan dalam proses asesmen memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Asesmen berfungsi sebagai dasar penetapan program layanan bimbingan dan konseling<sup>13</sup>. ketidak tersediaan instrumen pengumpul data menyebabkan program yang dibuat tidak berdasarkan kebutuhan peserta didik. Program dibuat berdasarkan materi yang dirasa guru pembimbing dibutuhkan oleh peserta didik.

Masalah yang ketiga dihadapi guru pembimbing dalam hal kelengkapan penunjang teknis. Bahan-bahan informasi karir, sosial, belajar dan pribadi yang tersedia di ruang BK merupakan bahan yang sudah bertahun-tahun digunakan tanpa diperbaharui. Tanpa informasi dasar yang tepat tidak ada kegiatan bimbingan yang mungkin

---

<sup>13</sup> Gantina komalasari dkk, *asesmen teknik non tes dalam perspektif BK komprehensif*. (Jakarta:PT indeks,2011)h,19

dilakukan<sup>14</sup>. Kegiatan yang dilakukan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan Prasarana merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Ruang bimbingan dan konseling hendaklah nyaman yang menyebabkan para pelaksana bimbingan dan konseling nyaman bekerja. Kenyamanan itu merupakan modal utama bagi kesuksesan pelayanan yang terselenggara<sup>15</sup>. Begitu pula dengan sarana dan prasarana pada aspek lain, harus tersedia sesuai kebutuhan. Pada kenyataannya, terdapat beberapa sarana dan prasarana bimbingan konseling yang masih kurang memadai. Mengingat pentingnya sarana dan prasarana bimbingan dan konseling bagi penyelenggaraan bimbingan dan konseling, peneliti tertarik untuk meneliti kondisi sarana dan prasarana bimbingan dan konseling yang terdapat di sekolah.

---

<sup>14</sup> Jonathan, *Does Guidance Have a Future? Notes Towards a Distinctive Position* (Cambridge: Taylor & Francis Ltd, 1999) h.5

<sup>15</sup> *Ibid.*, h.51

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu :

1. Bagaimana proses penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah atas Jakarta Barat?
2. Apa faktor yang menjadi penyebab rendahnya minat konseling di sekolah menengah atas Jakarta Barat?
3. Bagaimana persepsi siswa terhadap sarana dan prasarana bimbingan dan konseling di sekolah menengah atas Jakarta Barat?
4. Bagaimana pemenuhan standar sarana dan sarana bimbingan dan konseling yang tersedia di sekolah di sekolah menengah atas Jakarta Barat.

## **C. Pembatasan Masalah**

Sarana dan Prasarana merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling , maka peneliti membatasi penelitian ini pada pemenuhan standar sarana dan prasarana bimbingan dan konseling pada SMA N di Jakarta Barat yang akan diukur menggunakan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di dalam Pedoman Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka rumusan masalah yang diajukan adalah, bagaimana gambaran pemenuhan standar sarana dan prasarana bimbingan dan konseling pada SMA N di Jakarta Barat?.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memenuhi dan melakukan perbaikan dalam hal pemenuhan standar sarana dan prasarana bimbingan dan konseling.

2. ABKIN

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi ABKIN dalam melakukan advokasi atas kondisi yang terjadi di sekolah.

3. Kepala sekolah

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi kepala sekolah agar lebih memperhatikan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling.

#### 4. Guru BK

Penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi agar guru bimbingan dan konseling lebih memperhatikan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling yang berguna untuk menunjang profesi mereka.

#### 5. Peneliti dan peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai penelitian mengenai sarana dan prasarana bimbingan dan konseling yang tersedia di sekolah.